



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SMA NEGERI 1 PRABUMULIH

Satuan Pendidikan	:	SMA Negeri 1 Prabumulih
Kelas / Semester	:	XI / Genap
Tema	:	Peristiwa Pembentukan Pemerintahan Pertama RI pada Awal Kemerdekaan dan Maknanya bagi Kehidupan Kebangsaan Indonesia Masa Kini
Sub. Tema	:	Sidang PPKI
Pembelajaran ke	:	1
Alokasi Waktu	:	10 menit

A. Tujuan Pembelajaran

Melalui model pembelajaran Problem Based Learning dengan metode diskusi dan tanya jawab diharapkan peserta didik mampu menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini dengan mengembangkan nilai karakter **Religiositas**, berpikir kritis, kreatif (**kemandirian**), kerjasama (**gotong royong**) dan kejujuran (**integritas**).

B. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pendahuluan (2 Menit)
Guru : Apersepsi <ul style="list-style-type: none">❖ Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, meminta peserta didik untuk berdo'a❖ Mengecek kehadiran peserta didik❖ Mengkondisikan kelas agar peserta didik siap menerima materi❖ Mengajukan pertanyaan tentang materi minggu yang lalu ” peristiwa apa saja yang menyebabkan pemuda Indonesia mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan RI?”❖ Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran yang akan dilakukan “apakah pada saat Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 Indonesia sudah menjadi sebuah negara yang berdaulat?”❖ Guru menjelaskan tujuan pembelajaran❖ Guru menyampaikan karakter dan penilaian yang akan dilaksanakan Motivasi

- ❖ Memberikan gambaran tentang manfaat pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan inti (6 Menit)

Sintakes	Aktivitas
Orientasi peserta didik pada masalah	Peserta didik diberi motivasi untuk memusatkan perhatian pada materi yang akan di pelajari dengan cara mengamati lembar kerja dan pemberian contoh-contoh soal untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif yang berhubungan dengan peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini.
Mengorganisasi peserta didik	Guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami masalah yang di sajikan yaitu menganalisis apa yang mereka ketahui, apa yang mereka perlu ketahui dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan materi “Peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini”.
Membimbing penyelidikan individu/kelompok	Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan diskusi dan saling tukar informasi terkait dengan ”Peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini ”.
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Menyampaikan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang ”Peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini ”.
Menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah	Peserta didik menganalisis dan menyimpulkan masukan, tanggapan dan koreksi dari guru terkait pembelajaran yang telah dilakukan tentang ”peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini”.

Kegiatan Penutup (2 Menit)

1. Guru mrlalukan refleksi hasil proses belajar yang telah dilaksanakan.
2. Peserta didik, dengan bimbingan guru, membuat kesimpulan.
3. Guru memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik yang telah bekerjasama dengan baik dalam kelompok.
4. Guru memberikan evaluasi untuk mengukur ketuntasan PMB.
5. Guru menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya.
6. Guru meminta siswa untuk berdo'a sebagai tanda berakhirnya pelajaran
7. Salam

C. Penilaian

Sikap	Lembar observasi
Pengetahuan	Tes tertulis
Keterampilan	Lisan / Diskusi Kelompok

Mengetahui
Kepala Sekolah

MAASHOBIRIN, S.Pd,M.Si
NIP. 19660201 19890301 1 007

Prabumulih, Januari 2022

Guru Mata Pelajaran

DIAN HANDAYANI, S.Pd
NIP. 19780602 200501 2 008

Lampiran-Lampiran

A. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Teknik Penilaian (terlampir)

a. Sikap

- Penilaian Observasi

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Berikut contoh instrumen penilaian sikap

No	Nama Siswa	Aspek Perilaku yang Dinilai				Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
		BS	JJ	TJ	DS			
1	Muhammad Zacky	75	75	50	75	275	68,75	C
2	

Keterangan :

- BS : Bekerja Sama
- JJ : Jujur
- TJ : Tanggun Jawab
- DS : Disiplin

Catatan :

1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria:
100 = Sangat Baik
75 = Baik
50 = Cukup
25 = Kurang
2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria = $100 \times 4 = 400$
3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = $275 : 4 = 68,75$
4. Kode nilai / predikat :
75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB)
50,01 – 75,00 = Baik (B)

25,01 – 50,00 = Cukup (C)
 00,00 – 25,00 = Kurang (K)

5. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai

- **Penilaian Jurnal** (*Lihat lampiran*)

b. Pengetahuan

- **Tertulis Uraian** (*Lihat lampiran*)
- **Tes Lisan/Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan**
Praktek Monolog atau Dialog

Penilaian Aspek Percakapan

No	Aspek yang Dinilai	Skala				Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
		25	50	75	100			
1	Intonasi							
2	Pelafalan							
3	Kelancaran							
4	Ekspresi							
5	Penampilan							
6	Gestur							

- **Penugasan** (*Lihat Lampiran*)

Tugas Rumah

- Peserta didik menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku cetak peserta didik
- Peserta didik meminta tanda tangan orangtua sebagai bukti bahwa mereka telah mengerjakan tugas rumah dengan baik
- Peserta didik mengumpulkan jawaban dari tugas rumah yang telah dikerjakan untuk mendapatkan penilaian.

c. Keterampilan

- **Penilaian Unjuk Kerja**

Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian ujian keterampilan berbicara sebagai berikut:

Instrumen Penilaian

No	Aspek yang Dinilai	Sangat Baik (100)	Baik (75)	Kurang Baik (50)	Tidak Baik (25)
1	Kesesuaian respon dengan pertanyaan				
2	Keserasian pemilihan kata				
3	Kesesuaian penggunaan tata bahasa				

No	Aspek yang Dinilai	Sangat Baik (100)	Baik (75)	Kurang Baik (50)	Tidak Baik (25)
4	Pelafalan				

Kriteria penilaian (skor)

100 = Sangat Baik

75 = Baik

50 = Kurang Baik

25 = Tidak Baik

Cara mencari nilai (N) = Jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali skor ideal (100)

Instrumen Penilaian Diskusi

No	Aspek yang Dinilai	100	75	50	25
1	Penguasaan materi diskusi				
2	Kemampuan menjawab pertanyaan				
3	Kemampuan mengolah kata				
4	Kemampuan menyelesaikan masalah				

Keterangan :

100 = Sangat Baik

75 = Baik

50 = Kurang Baik

25 = Tidak Baik

1. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Remedial

Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM), maka guru bisa memberikan soal tambahan misalnya sebagai berikut :Pembelajaran remedial dilaksanakan segera setelah diadakan penilaian pada peserta didik yang mendapatkan nilai dibawah KKM. Strategi remedial dilaksanakan dengan pembelajaran remedial, penugasan dan tutor sebaya berdasarkan indicator pembelajaran yang belum dicapai masing-masing peserta didik.

PROGRAM REMIDI

Sekolah : SMA Negeri 1 Prabumulih
 Kelas/Semester : XI / Genap
 Mata Pelajaran : Sejarah Wajib
 Ulangan Harian Ke :
 Tanggal Ulangan Harian :
 Bentuk Ulangan Harian :
 Materi Ulangan Harian :
 (KD / Indikator) :

KKM :

No	Nama Peserta Didik	Nilai Ulangan	Indikator yang Belum dikuasai	Bentuk Tindakan Remedial	Nilai Setelah Remedial	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
dst						

b. Pengayaan

Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru memberikan soal pengayaan sebagai berikut :

- 1) Membaca buku-buku tentang Dibawah Bendera Revolusi yang relevan.
- 2) Mencari informasi secara online tentang Dibawah Bendera Revolusi
- 3) Membaca surat kabar, majalah, serta berita online tentang Dibawah Bendera Revolusi

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Sekolah : SMA Negeri 1 Prabumulih
Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia
Kelas / Semester : XI/Genap
Materi Pokok : Peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Indonesia pada awal kemerdekaan dan maksnanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini.
Pertemuan ke : 1

A. Kompetensi Inti

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar

- 3.7 Menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini
- 4.7 Menyajikan hasil penalaran peristiwa pembentukan pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini dan menyajikannya dalam bentuk lisan, tulisan, dan/atau media lain

C. Tujuan Pembelajaran

Melalui model pembelajaran Problem Based Learning diharapkan peserta didik mampu Menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini dengan mengembangkan nilai karakter **Religiositas**, berpikir kritis, kreatif (**kemandirian**), kerjasama (**gotong royong**) dan kejujuran (**integritas**).

D. Petunjuk Kerja

- Bacalah dengan seksama ringkasan materi di bawah ini
- Lakukan analisis pada soal yang diberikan tentang materi pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dengan teman satu kelompokmu
- Lengkapi lembar kerja peserta didik
- Mempresentasikan hasil kerja kelompokmu pada teman-temanmu.

RINGKASAN MATERI

A. Sidang-Sidang PPKI

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI sebagai badan politik satu-satunya segera mengambil prakarsa dan tindakan politik untuk mengendalikan negara dengan menyelenggarakan sidangnya yang pertama.

Dalam sidang itu, PPKI berhasil menetapkan 3 keputusan penting, yaitu :

- 1) Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 menjadi UUD Negara RI. masih berupa RUUD, dilakukan beberapa perubahan atas usul Drs. Moh. Hatta. Perubahan-perubahan tersebut antara lain: rumusan sila pertama Pancasila yang sebelumnya mengambil dari isi Piagam Jakarta yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bab III, Pasal 6, UUD 1945 yang sebelumnya berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” diubah menjadi “Presiden adalah orang Indonesia asli”.

- 2) Memilih dan menetapkan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden (atas usulan Otto Iskandardinata)
- 3) Membentuk suatu Komite Nasional untuk membantu presiden selama MPR/DPR terbentuk.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang kedua. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno menunjuk Mr. Achmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman Singodimedjo untuk membentuk Panitia Kecil yang akan membicarakan bentuk departemen, bukan personalianya.

Rapat Panitia Kecil tersebut dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Dalam sidang tersebut ditetapkan beberapa keputusan, di antaranya yaitu :

- 1) Menetapkan 12 kementerian yang bertugas membantu presiden
- 2) Membagi wilayah RI ke dalam 8 propinsi serta menunjuk para gubernurnya
- 3) Akan membentuk suatu Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Selanjutnya pada sidangnya yang ketiga tanggal 22 Agustus 1945, berhasil ditetapkan tiga keputusan lagi, yaitu :

- 1) Pembentukan Komite Nasional Indonesia yang berpusat di Jakarta.
- 2) KNIP adalah badan yang berfungsi sebagai Pusat DPR sebelum Pemilu diselenggarakan dan disusun dari tingkat pusat hingga daerah.
- 3) PNI dirancang menjadi partai tunggal di Indonesia, (namun akhirnya dibatalkan)
- 4) Membentuk Badan Keamanan Rakyat. BKR ini berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.

B. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa alat-alat kelengkapan negara RI terdiri atas lembaga tinggi (Presiden, MA, DPR, DPA, BPK) dan lembaga tertinggi negara (MPR). Sementara MPR yang harus dibentuk melalui pemilu belum terbentuk, maka PPKI dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan akan membentuk Komite Nasional dengan tugas membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Pada tanggal 16 Oktober 1945, diselenggarakan sidang KNIP pertama dengan ketuanya Mr. Kasman Singodimedjo. Dalam sidangnya, dikeluarkan dua keputusan yaitu :

- 1) Pembentukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) dengan jumlah anggota 15 orang,
- 2) Mengusulkan kepada presiden supaya KNIP diberi hak legislatif selama DPR/MPR belum terbentuk. Usulan ini kemudian diperkuat dengan Maklumat Wakil Presiden No. X.

Dalam perkembangan berikutnya, BP-KNIP dikuasai oleh golongan sosialis pimpinan Sutan Syahrir dan Amir Syarifudin. Golongan ini mendesak pemerintah untuk segera mengizinkan dibentuknya partai-partai politik. Sebab bila hanya satu partai politik saja dikhawatirkan muncul anggapan dari negara-negara Barat (Sekutu) bahwa Indonesia negara fascis, bukan negara demokrasi. Usul tersebut kemudian ditanggapi pemerintah dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No. 3 tanggal 3 November 1945, yang berisi anjuran pemerintah untuk membentuk partai-partai politik.

C. Pembentukan Kabinet RI dan Pembagian Wilayah

Sebagai realisasi hasil keputusan PPKI (19 Agustus 1945) tentang pembentukan 12 kementerian dan pembentukan wilayah RI ke dalam delapan provinsi, maka pada tanggal 2 September 1945, dibentuklah Kabinet RI pertama dan 8 propinsi. Kabinet RI pertama ini merupakan Kabinet Presidentil berdasarkan

UUD 1945. Susunan Kabinet RI pertama yang terdiri atas 12 departemen dan 4 menteri negara. Adapun 8 propinsi beserta gubernurnya yaitu :

No.	Nama Propinsi	Nama Gubernur
1.	Sumatera	Mr. Teungku Mohammad Hassan
2.	Jawa Barat	Soetardjo Kartohadikusumo
3.	Jawa Tengah	Rd. Panji Suroso
4.	Jawa Timur	R.A. Soeryo
5.	Sunda Kecil	I Gusti Ketut Pudja
6.	Maluku	J. Latoeharhary
7.	Sulawesi	G.S.J. Ratulangi
8.	Kalimantan	Ir. Pangeran Mohammad Noer

Dengan dilakukannya pembagian wilayah ke dalam delapan provinsi disertai para gubernurnya merupakan keputusan politik yang amat penting bagi penataan negara dan pemerintahan Indonesia yang mempunyai wilayah cukup luas. Dengan demikian, upaya membina dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilaksanakan. Hal ini terbukti ketika bangsa Indonesia menghadapi kedatangan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) yang bermaksud menjajah kembali, dengan adanya para gubernur sebagai pemimpin tertinggi di daerah-daerah maka pertahanan keamanan di seluruh daerah Indonesia menjadi kuat.

D. Pembentukan Badan-Badan Perjuangan dan TNI

Pada tanggal 22 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan berdirinya Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pemerintah menegaskan bahwa BKR selain berfungsi sebagai badan penolong keluarga korban perang juga sebagai induk organisasi untuk memelihara keselamatan rakyat. Anggota BKR terdiri dari bekas anggota Peta, Heiho, Keibodan, Seinendan dan KNIL. Untuk mengkoordinir BKR di daerah, maka bekas anggota Peta di Jakarta membentuk BKR Pusat dengan susunan pengurusnya :

Ketua Umum : Kaprawi (eks daidanco Sukabumi)
Ketua I : Sutralaksana
Ketua II : Latif Hendraningrat

BKR Pusat segera menjalin hubungan dengan BKR-BKR daerah seperti BKR Jawa Barat (Arudji Kartawinata), Jawa Tengah (Soedirman), dan Jawa Timur (drg. Mustopo). Pembentukan BKR ternyata menimbulkan ketidakpuasan sebagian para pemuda yang menginginkan dibentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tetapi keinginan para pemuda tersebut ditolak oleh pemerintah dengan alasan agar tidak memancing dan membangkitkan permusuhan terhadap kekuatan-kekuatan asing yang masih ada di Indonesia. Karena ditolak, akhirnya para pemuda seperti Soekarni, Adam Malik, Chaerul Saleh, dll. mendirikan badan perjuangan sendiri yang disebut Komite van Aksi yang bemarkas di Asrama Menteng 31 Jakarta. Adapun laskar-laskar pemuda yang tergabung dalam Komite van Aksi di antaranya : Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Buruh Indonesia (BBI), Barisan Banteng, Hizbullah, Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), Sabilillah, Pemuda Sosialis Indonesia. Selain itu ada kesatuan-kesatuan khusus yang dekat hubungannya dengan BKR, seperti Tentara Pelajar, dan Tentara Genie Pelajar.

Gerakan pemuda yang tergabung dalam Komite van Aksi pada akhirnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam rangka pembentukan TNI yang juga didorong oleh situasi dan kondisi yang berat pada waktu itu, karena kedatangan tentara Sekutu diboncengi NICA. Pada bulan September sampai Desember 1945, merupakan masa-masa pertempuran sengit yang terjadi di kota-kota besar Indonesia dalam menghadapi NICA yang dibantu pasukan Inggris yang berencana menguasai kembali Indonesia. Menghadapi situasi yang kritis, maka

pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan Kepala Staf Umumnya Letkol Oerip Soemohardjo. Oerip Soemohardjo terkenal dengan ucapannya, yaitu “Aneh suatu negara *zonder* tentara“ (*zonder* = tanpa).

Sampai sekarang tanggal 5 Oktober selalu diperingati sebagai Hari TNI atau Hari Angkatan Bersenjata. Pada tanggal 12 November 1945, pemerintah mengangkat Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar TKR. Pada tanggal 25 Januari 1946, TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia, dan tanggal 3 Juni diubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian.

Sekelompok Tentara Keamanan Rakyat (kiri) dan Panglima Besar TKR, Jendral Soedirman

Pada dasarnya, proses terbentuknya TNI berasal dari perjuangan rakyat. TNI lahir dan berkembang bersama rakyat. TNI merupakan wadah perjuangan dalam mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Pada masa Perang Kemerdekaan (Revolusi Fisik), TNI senantiasa bahu membahu bersama rakyat untuk mengusir Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia.

E. Pembentukan Partai Politik

Sejalan dengan perkembangan politik dan pemerintahan pada awal kemerdekaan, maka sistem kepartaian pun mengalami perubahan. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah RI hanya mengakui satu partai politik yang berlaku di Indonesia, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI). Namun, tokoh-tokoh bangsa Indonesia merasa tidak puas dan menganggap sudah saatnya membentuk beberapa partai politik. Akibat desakan itulah, berdasarkan Maklumat Pemerintah No. 3 tanggal 3 November 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan partai-partai politik sebagai wadah penyaluran aspirasi rakyat Indonesia. Maklumat tersebut mendapat sambutan dari tokoh-tokoh partai politik.

Adapun nama-nama partai politik yang dibentuk diantaranya Partai nasional Indonesia (PNI), Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) Majelis Syura Moeslimin Indonesia (Masyumi), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI).

Perkembangan partai politik menyebabkan timbulnya keberagaman ideologi yang berpengaruh terhadap kehidupan partai politik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keberagaman ideologi politik tersebut disebabkan setiap partai politik menggunakan asas dan ideologi politik yang berbeda-beda. Dalam perkembangannya, jumlah partai politik di Indonesia terus bertambah. Mereka selalu bersaing untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari rakyat. Bahkan, diantara partai politik itu ada yang dijadikan alat oleh kaum politisi untuk berebut kursi dan jabatan dalam pemerintahan. Terjadilah pertentangan di antara partai-partai politik sehingga mengganggu jalannya pemerintahan.

Dalam suasana yang penuh pertentangan politik, BP-KNIP mengusulkan kepada pemerintah agar menteri-menteri bertanggung jawab kepada KNIP (parlemen) bukan kepada presiden. Pemerintah ternyata menyetujui usul tersebut sehingga terbentuklah Kabinet Parlementer pada 14 November 1945. Soetan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri sehingga kabinetnya dinamakan Kabinet Syahrir.

Pembentukan Kabinet Syahrir yang bersifat parlementer itu merupakan penyimpangan pertama kali pemerintah RI terhadap ketentuan UUD 1945. Para menteri tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada parlemen (KNIP). Padahal, UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintahan harus dijalankan menurut sistem Kabinet Presidensial. Dalam kenyataannya, kabinet dan parlemen (KNIP) selalu bersaing memperebutkan pengaruh dan kedudukan. Akibatnya, kabinet selalu berganti-ganti karena dijatuhkan oleh parlemen.

F. Pertanyaan

a. Tugas Kelompok

1. Apakah pada saat Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 Indonesia sudah menjadi sebuah negara yang berdaulat? Berikan alasanmu!
2. PPKI melakukan sidang sebanyak tiga kali pada awal kemerdekaan. Apakah sidang-sidang tersebut memiliki hubungan yang sangat erat terhadap pembentukan pemerintahan pertama RI pada awal kemerdekaan? Berikan alasanmu!
3. Setelah kalian mempelajari materi ini, apa makna pembentukan pemerintahan pertama RI pada awal kemerdekaan menurut kalian? Berikan penjelasanmu.

b. Tugas Individu

1. Perhatikan data dibawah ini!

1. Membentuk Komite Nasional
2. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 menjadi UUD Negara RI
3. Menetapkan 12 kementerian
4. Membentuk Badan Keamanan Nasional
5. Menetapkan PNI sebagai satu-satunya partai
6. Membagi wilayah Indonesia menjadi 10 Provinsi

Berdasarkan data diatas yang termasuk dalam keputusan sidang PPKI ke 1 adalah....

- a. 1 dan 2
 - b. 3 dan 4
 - c. 2 dan 6
 - d. 3 dan 5
 - e. 5 dan 6
2. Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa alat-alat kelengkapan negara RI terdiri atas lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara. Dibawah ini yang termasuk dalam lembaga tertinggi negara adalah....
 - a. DPA
 - b. Presiden
 - c. MPR
 - d. BPK
 - e. DPR
 3. Bentuk penyimpangan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada masa awal pemerintahan Indonesia dengan di bentuknya....
 - a. Sistem pemerintahan Presidensial
 - b. Sistem pemerintahan Parlementer
 - c. Berlakunya BP KNIP
 - d. Ditetapkannya KNIP
 - e. Dibentuknya Panitia Kecil

